

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024: PEMIMPIN DALAM PERSPEKKTIF HADIST

Ahmad Khairuddin
Universitas Islam Antasari Banjarmasin

Email: ahmadkhairuddin@uin-antasari.ac.id

Abstract.

This study examines the criteria for leaders from a hadith perspective, especially in the face of the 2024 general election. This research aims to examine the meaning and criteria of leaders contained in hadith sources. This research is the result of literature research with qualitative methods. The data used consisted of primary sources in the form of various hadith books that discussed the criteria for leaders, as well as secondary sources in the form of books, articles, journals and other references relevant to the theme of the discussion. The data analysis method used is descriptive analytical. This study examines the criteria for leaders from a hadith perspective, especially in the face of the 2024 general elections/regional elections. This study explains the political system and elections in Indonesia, the simultaneous election of regional heads if seen at first glance is a solution to the non-ideal implementation of regional head elections which are relatively large and repetitive, but if you look at it in depth, it can still be discussed in detail about the negative side of the policy. This is because there are some regional heads whose term of office must be reduced, thus contrary to several legal norms (UU). Including challenges and polemics that often arise, such as leadership quality and political polarization. This research finds seven prophetic traits that leaders must have, namely: religion and understanding of religious values, having science and managerial, acting fairly in leadership, being able to carry out and fulfilling the mandate given, having integrity and honesty, having a responsible attitude and understanding that all have their responsibilities to Allah and the society they lead and having experience, spiritual maturity, maturity and wisdom even though they are still young.

Keyword: Leader Criteria; 2024 Elections/Elections, experience and responsibilities

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kriteria pemimpin perspektif hadis, terutama dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dan kriteria pemimpin yang terdapat dalam sumber-sumber hadis. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa berbagai kitab hadis yang membahas tentang kriteria pemimpin, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan tema pembahasan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji tentang kriteria pemimpin perspektif hadis, terutama dalam menghadapi pemilihan umum/pilkada tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan sistem politik dan pemilu di Indonesia, Pemilihan serentak kepala daerah jika dilihat secara sepintas merupakan solusi dari ketidak idealan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jumlahnya relatif banyak dan berulang, namun jika dicermati secara

mendalam masih dapat didiskusikan secara detail tentang sisi negatif dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan terdapat sebagian kepala daerah yang masa jabatannya harus dikurangi, dengan demikian bertentangan dengan beberapa norma hukum (UU), termasuk tantangan dan polemik yang sering muncul, seperti kualitas kepemimpinan dan polarisasi politik. Penelitian ini menemukan tujuh karakter sifat-sifat profetik yang harus dimiliki pemimpin yaitu: beragama dan memahami nilai-nilai agama, memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial, berlaku adil dalam kepemimpinan, mampu menjalankan dan menunaikan amanah yang diberikan, berintegritas dan jujur, memiliki sikap bertanggung jawab dan memahami bahwa semua ada pertanggungjawabannya kepada Allah dan masyarakat yang dipimpinnya serta memiliki pengalaman, kematangan spiritual, kedewasaan dan kebijaksanaan walau masih dalam usia muda.

Kata kunci: *Kriteria Pemimpin; Pemilu/Piklada 2024, pengalaman dan tanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Persoalan kepemimpinan sedang hangat didiskusikan di Indonesia, terlebih menjelang pemilihan umum, acapkali diskursus ini menimbulkan perdebatan dan gesekan sosial yang dikhawatirkan bermuara pada perpecahan dan ketidakharmonisan. Potensi terjadinya konflik antar kelompok pendukung calon pemimpin sangat mungkin terjadi akibat dari gesekan sosial. Perdebatan dan polarisasi juga terjadi di ruang digital, yang mana dalam ruang ini penyebaran informasi terjadi sangat cepat dan masif.¹ Lebih jauh, teknologi digital sebagai media penyebar informasi sering digunakan dengan kurang bertanggung jawab.

Perdebatan tentang pemimpin yang paling baik di ruang publik seringkali menyertakan agama dan identitas agama di dalamnya. Beragam komentar dan ulasan tentang pemimpin dan calon pemimpin muncul seakan saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Bercermin dari fenomena ini, peneliti dalam tulisan ini akan membahas tentang kriteria dan karakter yang harus ada pada seorang pemimpin, yang mana konsep dan karakter dimaksud bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Bermuara dari keyakinan masyarakat muslim bahwa Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) dengan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin di muka bumi.² Dalam Islam, setiap individu harus memulai kepemimpinannya dari dirinya sendiri, dengan melakukan amal kebajikan untuk kebaikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah agar kehidupan menjadi selamat, bahagia, dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, peran sebagai pemimpin adalah hal

¹ Faris Budiman Annas, Hasya Nailan Petranto, dan Asep Aji Pramayoga, "Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)," Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), Vol. 20, no. 2 (2019): hlm. 111-122, <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>

² Wahbah al-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 126.

yang penting dalam setiap aspek kehidupan.³ Eksistensi pemimpin dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan, dikatakan bahwa enam puluh tahun dipimpin imam yang zalim masih lebih baik dari semalam tanpa pemimpin.⁴

Berdasarkan adagium bahwa pemimpin dalam Islam harus ada, maka beberapa pertanyaan diajukan dalam penelitian ini, antara lain bagaimana konsep dan gagasan hadis Nabi tentang karakter pemimpin yang ideal, karakter apa saja yang harus dimiliki, apakah usia dan kematangan pemimpin masuk dalam kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif hadis. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengayaan khazanah pemahaman hadis khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan karakter pemimpin. Di samping itu kajian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari rujukan bagi pegiat hadis.

Ai Faridah dan Titin Yuniartin,⁵ pada penelitiannya menyimpulkan bahwa seorang pemimpin sebagaimana hadis nabi Muhammad, yaitu pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya serta dicintai. Dan juga dinyatakan dalam hadis bahwa salah satu dari tiga kelompok yang tidak akan diterima shalatnya adalah seorang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Kemudian penelitian bertema “Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis” yang ditulis oleh Muhammad Khidri,⁶ dalam penelitiannya menyatakan bahwa kriteria kepemimpinan yang ideal berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. paling tidak memenuhi 5 unsur diantaranya memiliki jiwa kepemimpinan, professional, mampu melaksanakan, kepemimpinan sesuai dengan aspirasi rakyat dan merupakan hasil musyawarah, dan harus bertanggung-jawab.

Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits” ditulis oleh Umar Sidiq, menyimpulkan bahwa setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepadanya, paling tidak seorang pemimpin bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Serta salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dicintai dan didoakan rakyatnya, sebaliknya ciri pemimpin yang buruk adalah dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya.⁷ Dan “Konsep Etika Berpolitik dalam Kitab Sunan Abu Daud” yang ditulis oleh Sudarno Shobron, 8 Hasil penelitian ditemukan bahwa diantara etika seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Pemimpin dilarang untuk meminta jabatan, orang cacat boleh menjabat, harus dipilih oleh umat, harus dibaiat atau disumpah untuk melaksanakan jabatan dengan baik sesuai al-Qurân dan al-hadis. Pemimpin dilarang korupsi, memberikan perhatian yang serius atas kesejahteraan rakyat. Dalam berperang boleh mengirim pasukan yang umurnya 14 tahun, karena sudah baligh, sehingga beban membela negara wajib ada di pundaknya.

³ Ibnu Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyah*, Cet. 1 (Kairo: Dar Al-Hadis, 1996), hlm. 5

⁴ Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn Musa, *al-Bahru al-Muhit ast-Stujaj fi Syarh Shahih al-Imam Muslim ibn al-Hajaj*, Juz 16 (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2015), hlm. 109.

⁵ Ai Faridah dan Titin Yuniartin, “Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis Nabi,” *Irfani*, Vol. 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36667/irfani.v2i1.235>.

⁶ Muhammad Khidri, “Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis,” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162>.

⁷ Umar Sidiq, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits,” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 12, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.305>.

Penelitian tersebut hampir semuanya membahas tentang kepemimpinan, karakter, dan etika politik, sementara penelitian ini di samping membahas tentang karakter ideal pemimpin dalam perspektif hadis juga membahas sejauh mana isu usia, pengalaman dan kematangan kepemimpinan diulas dalam hadis. Sejauh yang peneliti temukan, isu usia dan kematangan masih belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Terkait konsep pemilihan umum dan Pilkada serentak juga diterangkan dalam hadits Rasulullah “Apabila terdapat tiga orang yang melakukan suatu perjalanan jauh, maka hendaklah memutuskan salah satu diantaranya menjadi seorang pemimpin.⁸ Dari keterangan Nabi Saw. Tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya apabila pada konteks saat bepergian jauh membutuhkan suatu pemimpin, maka pada perkara yang lebih besar yakni mengurus tatanan negarapun wajib hukumnya membutuhkan seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW telah memberikan suatu teladan dan contoh yang nyata terkait metode menentukan seorang pemimpin dalam konsep Siyasa. Metode tersebut ialah dengan memilih pemimpin negara⁹

Menelisik lebih jauh yakni fakta sejarah masa keislaman, dimana sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW telah dilakukan pengangkatan kepala negara yang dimulai dari masa kepemimpinannya Abu Bakar, kemudian terus mengalami perubahan dari setiap masanya. Misalnya, mekanisme pengangkatan khalifah Abu Bakar melalui jalur musyawarah, selanjutnya, dikukuhkannya seorang Umar Bin Khattab sebagai khalifah merupakan utusan/mandat dari khalifah Abu Bakar. Berikutnya, diangkatnya Usman bin Affan melalui proses mufakat dewan pemilih yang langsung dipilih Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib dibaiat menjadi khalifah atas desakan yang kuat dari pengikutnya setelah terjadinya pemberontakan dan perebutan kekuasaan melawan Muawwiyah¹⁰

Pada sisi lainnya, adanya pemilihan umum dan Pilkada secara langsung dan diserentakkan pada tahun 2024 adalah sebagai suatu instrumen bersejarah dan strategis guna membentuk Negara dan pemerintahan daerah yang demokratis dan sistematis. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Isu krusial berikutnya adanya tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan serentak 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

⁸ Abdurrahman Abdullah, "Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi SAW Wafat", Politea: Jurnal Politik Islam, 4.1 (2021), 147–60.

⁹ Sutisna Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 1.01 (2017)

¹⁰ Indra Utama Tanjung, "Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia", Jurnal Penelitian Medan Agama, 2018.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu dilakukan simulasi sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional dengan mempertimbangkan ketentuan bahwa Pemilu serentak diatur dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 pada UU 7/2017 yaitu (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.³⁷ Sementara Pemilihan serentak diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.¹¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokratis yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perspektif Islam, pemilihan pemimpin atau kepala daerah memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, konsep kepemimpinan dan pemerintahan memiliki landasan kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama yang relevan dalam konteks Pilkada adalah keadilan (al-'adl) Keadilan merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Pemimpin yang dipilih harus mampu menegakkan keadilan tanpa diskriminasi.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58). Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban memilih pemimpin yang amanah dan kompeten. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT

Seorang pemimpin haruslah seseorang yang dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam memilih dan menjalankan amanah kepemimpinan. Pemimpin yang dipilih haruslah seseorang yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Apabila tiga orang keluar untuk

¹¹ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76.

bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan pentingnya adanya pemimpin dalam setiap kelompok untuk menjaga keteraturan dan ketertiban. Dalam konteks Pilkada, hal ini berarti bahwa masyarakat harus aktif dalam memilih pemimpin yang dapat menjaga keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada, penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. Islam menentang segala bentuk kecurangan dan manipulasi dalam proses pemilihan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah. Dimasa sekarang pragmatisme dalam mencapai sebuah kemenangan di dalam pilkada adalah masalah korupsi dan politik uang menjadi tantangan besar dalam proses Pilkada. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas untuk mengatasi masalah ini.

Politik uang pada dasarnya adalah bentuk suap (risywah), yang dilarang keras dalam Islam. Al-Qur'an menyatakan: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap dalam urusan hukum.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Hadis ini menunjukkan bahwa baik pemberi maupun penerima suap mendapat laknat (kutukan) dari Allah SWT, menegaskan betapa seriusnya dosa tersebut.

KAJIAN PUSTAKA.

Pemilu di Indonesia

Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pemilihan umum (pemilu).¹² Pemilu menjadi mekanisme vital untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta mewakili kepentingan Masyarakat. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menentukan arah masa depan negara. Pemilu di Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah, dan diadakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹³

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berpegang teguh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal semacam ini sangat keterkaitan dengan dilaksanakan pemilu saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum

¹² Mustafa Habib, “Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi (Kajian Pemilu Indonesia),” *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 1, no. 1 (2020): hlm. 91-99, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index-.php/jbs/article/-view/392>

¹³ Heri Kusmanto, “Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no. 1 (2014): hlm. 83, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>.

diadakan untuk rakyat, hasil dari pemilu merupakan hasil dari rakyat. Dalam hal ini sama persis dengan prinsip pada kedaulatan rakyat yakni, kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, serta pertanggungjawaban. Tokoh Morissan menguraikan argumentasinya terhadap tujuan pemilu yaitu sebagai sarana dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Berdasarkan relasi antara rakyat dengan kekuasaan negara pada kehidupan sehari-hari, terdapat dua teori yang telah ditumbuhkembangkan, yakni: Teori demokrasi langsung (*Direct Democracy*) dan Teori demokrasi tidak langsung (*Representative Democracy*)¹⁴

Pelaksanaan kedaulatan dengan metode secara langsung (*Direct Democracy*) dilaksanakan dengan teknik pemilihan umum (pemilu) guna sebagai pelaksanaan referendum dengan memaparkan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Pemilu yang merupakan sarana proses berjalannya kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan basis sistem LUBERJURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali. Terdapat empat prinsip yang dipegang oleh kedaulatan rakyat yaitu:¹⁵

1. Argumentasi maupun aspirasi dari rakyat belum tidak selalu persis pada jangka waktu panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat memiliki sifat dinamis sehingga dalam segi pendapat ataupun aspirasi akan berubah seiring dengan berjalannya kehidupan.
2. Disamping dengan pendapat atau aspirasi rakyat yang dapat berubah-ubah, maka kondisi kehidupan masyarakatpun bisa berubah.
3. Perubahan-perubahan terhadap aspirasi dan pilihan rakyat dapat disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk serta rakyat yang dewasa.
4. Pemilu dilaksanakan dengan teratur dalam artian menjamin terbentuknya sistem kepemimpinan negara terhadap bidang kekuasaan eksekutif dan bidang kekuasaan legislatif.

Pada tataran teoritis dipadukan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif pada hari pemungutan suara yang sama dikenal dengan konsep pemilu serentak.¹⁶ Dalam pengaturan serupa untuk menciptakan kerangka kerja politik, gagasan tentang keputusan bersamaan hanya dikenal di negara-negara yang berpegang pada pengaturan resmi pemerintahan.¹⁷

Proses pemilihan umum (Pemilu), dan Pilkada seringkali muncul berbagai tantangan dan polemik yang menjadi perhatian utama. Tantangan ini mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah kualitas kepemimpinan dan polarisasi politik. Tantangan pertama terkait dengan kualitas kepemimpinan yang bersaing dalam pemilu. Calon pemimpin ideal adalah yang memiliki kualitas, berintegritas, dan memiliki rekam jejak mampu menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik. Polemik mengenai kualitas kepemimpinan ini seringkali memicu perdebatan

¹⁴ Fitri Ayuningtyas dan Adelia Wahyuningtyas, "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Amnesti Jurnal Hukum*, 5.1 (2023), 138–50

¹⁵ *Ibid*, Hlm 42

¹⁶ Hayat Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 468–91.

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). hlm. 32

sengit dan mempengaruhi pandangan serta dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin.

Tantangan lainnya adalah polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan dan ideologi antar partai politik seringkali menyebabkan perpecahan dan konflik di Masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan polemik ini, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan menjadi kunci dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi penting dalam menciptakan kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa.¹⁸ Selain dua tantangan di atas, baru-baru ini muncul polemik lain, seperti polemik batas usia calon presiden dan wakil presiden digugat oleh Almas Tsaqibbirru di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁹ Sebelumnya, batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun, batasan inilah yang digugat. Dikutip dari Kompas TV, “Almas Tsaqibbirru mengatakan alasan menggugat batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Almas menyebut tujuannya menggugat untuk memberikan jalan alternatif bagi generasi muda yang memiliki kapasitas menjadi pemimpin”.²⁰

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemimpin.

Kata *ra'is* digunakan untuk menyebut pemimpin dalam bahasa Arab dan berasal dari kata *ra's* yang berarti kepala. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang diikuti oleh orang lain. Meskipun jarang ditemui dalam teks-teks Islam, ada juga kata *ra'i* yang pada awalnya berarti penjaga atau penggembala hewan ternak. Selain itu, ada juga istilah “imam” yang berarti pemimpin dalam hal urusan agama dan duniawi. Al-Mawardi dalam bukunya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, menjelaskan bahwa imam berfungsi untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi.²¹

Istilah “khalifah” juga digunakan dalam Islam yang merujuk pada pemimpin tertinggi. Istilah “*khalifah*” memiliki akar kata dari “*khalafa*” yang berarti menggantikan atau menanggalkan.²² Oleh karena itu, “khalifah” mencerminkan seseorang yang menggantikan posisi orang sebelumnya. Menurut kamus al-Munjid, “khalifah” didefinisikan sebagai orang yang menggantikan orang lain dan menempati posisinya, atau bisa juga merujuk kepada imam tertinggi yang tidak memiliki imam di atasnya.²³ Sementara itu, dalam *Mu'jam al-Shufi*, kata “khalifah” memiliki tiga makna: pertama, sesuatu yang datang setelah yang lain dan menempati posisinya seperti dalam (QS. Ali Imran 3: 190). Kedua, kebalikan dari maju atau depan (QS. Fussilat 41:42). Ketiga, perubahan (QS An-Nisa 4: 82).

¹⁸ Pangi Syarwi, “Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019,” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4, no. 1 (2022): hlm. 591-602, <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>.

¹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=bnljqFfo9z0>

²¹ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 5.

²² al-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 126.

²³ Luis Maklup, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Adab wa Al-A'lam* (Matba'ah al-Istiqamah, 1973), hlm. 192.

Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Salman al-Farisi tentang perbedaan antara khalifah dengan raja, dan Salman memberikan jawaban bahwa “khalifah” memiliki kemampuan untuk bertindak adil terhadap rakyatnya, memberikan hak-hak mereka dengan kesetaraan, serta memiliki kasih sayang seperti ayah kepada anaknya. Sebagai seorang khalifah, ia harus mengambil keputusan berdasarkan hukum Allah.²⁴

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthoniyah* memberikan definisi khalifah sebagai “Pengganti (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia”. Sementara Imam al-Ghazali berkata: “dunia adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia, kekuasaan dan agama adalah kembar, agama adalah tiang, sementara penguasa/pemimpin adalah penjaga.”²⁵ Sudut pandang Islam dalam memahami tentang relasi agama dan kepemimpinan ada dua pandangan teori. Pertama, Pandangan bahwa kepemimpinan memiliki keterkaitan yang erat dengan agama. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan.

Teori ini juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bagian integral dari misi agama, bahkan dianggap sebagai perintah agama itu sendiri. Namun, pandangan lain mengatakan bahwa kepemimpinan tidak memiliki keterkaitan dengan ajaran agama. Kepemimpinan dianggap sebagai suatu kebutuhan alami manusia dan bukanlah suatu perintah agama. Oleh karena itu, Nabi Saw. hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam konteks keagamaan dan bukan sebagai pemimpin negara. Nabi Saw. tidak pernah bertujuan untuk mendirikan negara, melainkan fokus pada penyampaian ajaran agama kepada umat. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum wajibnya keberadaan seorang imam (pemimpin) dalam suatu bangsa, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa keberadaan seorang pemimpin adalah wajib menurut akal. Mereka berargumen bahwa secara alami akal manusia akan menerima kebutuhan akan seorang pemimpin yang mampu menjaga dan mengatur interaksi antar anggota masyarakat, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.²⁶

Islam menilai bahwa keberadaan pemimpin atau imam dalam masyarakat merupakan suatu keharusan dan kebutuhan yang penting. Masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengatur kehidupan berkelompok agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan mencapai tujuan bersama. Selain itu, Masyarakat juga membutuhkan seorang imam yang dapat membimbing kehidupan beragama agar tepat dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan mereka, sehingga dapat mencapai kehidupan yang penuh kedamaian. Selaras dengan Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa seseorang tidak boleh keluar dari kepemimpinan, jika memberontak

²⁴ Ibnu Ibad, *al-Muhith fi al-Lughoh* (Kairo, t.t.), hlm. 364.

²⁵ Samsul Nizar dan Dkk, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 50

²⁶ Ibnu Khaldun dan Ismail Yakub, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Suatu Pendahuluan), 1982, hlm. 180-187.

kemudian meninggal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah atau sama dengan tidak beragama.²⁷

2. Kriteria-Kriteria Pemimpin Ideal dalam Hadis.

Tugas dan tanggung jawab besar yang diemban oleh pemimpin mengharuskannya memiliki karakter dan kepribadian yang kuat.²³ Karena kepemimpinannya memiliki dua dimensi yang penting. Pertama, adalah pertanggungjawaban kepada yang dipimpinnya (masyarakat). Kedua, adalah pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kedua dimensi ini akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan niat hanya karena Allah Swt. Berikut ini hadis-hadis yang peneliti temukan berkaitan dengan karakter yang harus tertanam dalam jiwa seorang pemimpin:

a. Beragama serta Memahami Nilai-Nilai Agama.

Pemimpin harus beragama, karena agama memberikan panduan dan pedoman secara komprehensif mengenai kepemimpinan. Pemahaman terhadap nilai-nilai agama harus hadir dan mengakar pada jiwa seorang pemimpin, seperti dicontohkan oleh Nabi Saw. di mana beliau berperan sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin agama. Apa yang dicontohkan Nabi Saw. ini menjadi bukti bahwa seorang pemimpin harus beragama dan memahami nilai-nilai agama, khususnya agama Islam.²⁸

Menurut Zuhairi nilai-nilai agama menanamkan sikap menghargai dan menghormati keberagaman, serta memelihara kerukunan antar warga dalam masyarakat yang multikultural dan plural. Pemahaman terhadap multikulturalisme dan pluralisme sebagai sunnatullah pada akhirnya bermuara pada sikap toleran dan tidak rigid dalam beragama, teladan Nabi ketika beliau memimpin kota Madinah menjadi bukti, satu di antaranya tercermin dalam piagam Madinah.²⁹

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى

الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan ta'at (terhadap seorang pemimpin) adalah wajib atas setiap

²⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fiya, al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulallah saw. wa Sunnatihi wa Ayyamihi (Sahih al-Bukhari), Cet. III, Juz 6 (Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t.), hlm. 2588. 2

²⁸ Muhammad Dahlan, "Nabi Muhammad Saw. (Pemimpin Agama dan Kepala Pemerintahan)," Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, Vol. 6, no. 2 (2018): hlm. 178-192, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i2.6912>.

²⁹ Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 4

muslim baik dalam perkara yang ia sukai atau pun yang ia benci kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada (kewajiban) mendengar dan tidak pula taat. (HR. Imam Ahmad ibn Hanbal)^{30,31}

Abu Sulaiman Hamdan ibn Muhammad al-Khitabi (388 H) dalam kitabnya *A'lam al-Hadis* menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus mendengarkan dan taat kepada pemimpin selama ia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Menurutnya, pemimpin yang beragama dan memahami nilai-nilai agama berpotensi tidak akan mengarahkan masyarakatnya kepada kemaksiatan.³² Ini juga berarti bahwa mendengarkan dan ketaatan itu wajib hanya kepada perintah yang benar.³³

b. Berilmu Pengetahuan

Nabi Muhammad Saw. menegaskan tentang pentingnya seorang pemimpin dan setiap individu memiliki ilmu pengetahuan.³⁰ Ilmu menjadi dasar bagi pemimpin untuk membawa dampak positif bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang berilmu akan lebih mampu memahami berbagai permasalahan yang dihadapi rakyatnya, sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan tepat.³⁴ Selain itu seorang pemimpin harus terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat

Jauh sebelum manusia modern menjelaskan tentang pemimpin harus berilmu, Rasulullah Saw sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang Pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At- Thabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a ia berkata:

Dari Abi Sa'id al-Huzri Ra. Rasulullah Saw suatu ketika berdiri di Tengah-tengah kami untuk berkhotbah. Beliau bersabda: “Ketahuilah, aku hampir dipanggil dan aku akan menjawabnya, Sehingga datang pemimpin-pemimpin setelah kalian yang berkata dan beramal dengan ilmu. Mentaati mereka merupakan ketaatan kepada Allah. Lalu waktu berselang. Hingga sepeninggal mereka, datanglah kepada kalian pemimpin-pemimpin yang mereka berkata dan beramal tanpa ilmu. Barangsiapa yang membantunya, menjadi pendampingnya, dan kuat membelanya, mereka akan binasa dan membuat kebinasaan. Maka pergaulilah pemimpin yang demikian dengan raga kalian, namun selisihilah dalam amal-amal kalian. Dan bersaksilah bahwa yang baik itu baik, serta bersaksilah bahwa yang buruk itu buruk”. (HR. Imam Baihaqi dan al-Thabrani)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya di masa depan akan muncul pemimpin-pemimpin yang bertindak dan berbicara berdasarkan ilmu pengetahuan.

³⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, trans. oleh Adil Mursyid, Juz 10 (Muasasah ar-Risalah, 2001), hlm. 379.

³¹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 4 (Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), hlm. 123.

³² Abu Sulaiman Hamdan ibn Muhammad al-Khitabi, *A'lam al-Hadis (Syarh Shahih al-Bukhari)*, Juz 2 (Saudi Arabia: Jami'ah Um al-Qura, 1988), hlm. 1415.

³³ Ibnu Bathal Abu al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abdul Mulik, *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibni Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rushdi, 2003), hlm. 214.

³⁴ al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hlm. 151.

Menurut Ibnu Bathal mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, karena keputusan dan tindakan mereka didasarkan pada pengetahuan yang benar. Namun, Nabi Muhammad Saw juga memperingatkan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang kurang berilmu, mereka akan bertindak dan berbicara tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Ibnu Bathal Mengatakan pemimpin yang berbicara dan bertindak tidak berdasarkan ilmu dipilih oleh rakyat karena Allah mengambil kembali apa yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya berupa ilmu-ilmu-Nya dengan kematian mereka.³⁵ Seperti pada hadis Berikut:

صحيح البخاري ٩٨: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَاسْتُلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفَرِّبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ³⁶.

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan".

Qadhi Iyadh menilai siapapun yang mendukung, membantu atau menjadi pendamping pemimpin yang buruk tersebut, akan ikut mendukung kehancuran. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw menasehati umatnya untuk menghindari pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki ilmu dan tidak bertindak berdasarkan pengetahuan.³⁷ Senada dengan pendapat Qadhi Iyadh tersebut, Imam an-Nawawi memaknai bahwa ilmu pada hadis di atas bukan berarti akan terhapus dari dada para penjaganya, melainkan berarti pembawanya akan mati dan masyarakat akan mengambil orang-orang jahil untuk menjadi pemimpin, karena kebodohan pemimpin yang dipilih itu mereka menjadi tersesat.³⁸

Menjadi pemimpin bagi orang banyak memerlukan kapasitas ilmu dan pemahaman manajerial yang baik, pemahaman manajerial erat kaitannya dengan efektivitas kepemimpinan. Sebab pemimpin harus melayani masyarakat dengan latar dan problematika yang kompleks, kepemimpinan juga dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang lain untuk bekerja secara maksimal ke arah

³⁵ Mulk, *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal*, hlm. 117.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, trans. oleh Musthafa Dib al-Bahga (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993).

³⁷ Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz 16 (Beirut: Dar Ihya at-Turast al-Arabi, 1431), hlm. 223.

³⁸ Muthik Chasnawati, "Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Lembaga," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 1 (2014): hlm. 72-86, <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.1.72-86>

pencapaian tujuan tertentu. Azhari Andi dalam penelitiannya menemukan bahwa ada tiga tanda dalam ayat tersebut dilihat dari interpretasi pendekatan semiotika Charles Sander Pierce, yaitu Nabi Adam merepresentasikan pengetahuan, Malaikat menandakan ketaatan dan kesalehan spiritual dan Iblis melambangkan warisan kepemimpinan dan faktor keturunan. Menarik yang khalifah (pemimpin) oleh Allah ada Nabi Adam yang mewakili pengetahuan, bukan Malaikat dan Iblis yang mana keduanya tidak memiliki pengetahuan (*asma'*).³⁹ Dari sini menjadi jelas bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, karena menjadi pemimpin adalah amanat yang sangat berat yang tidak semua orang dapat mengembannya. Pengetahuan ini mencakup aspek pengetahuan agama, pengetahuan manajerial dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan dalam memimpin.

c. Adil.

Seorang pemimpin haruslah bersikap adil dalam setiap aspek kepemimpinannya. Adil menjadi salah satu karakteristik utama seorang pemimpin, Ibnu Malak mengutip hadis bahwa “berlaku adil satu jam seperti beribadah selama enam puluh tahun”.⁴⁰ Dalam Islam, pemimpin yang adil akan menjadi teladan bagi seluruh warganya, menciptakan keselarasan dan persatuan di tengah-tengah mereka, serta mendapatkan berkah dan Ridha Allah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang adil akan melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan mengutamakan kemaslahatan umum, tanpa membedakan agama, ras, dan golongan agar terciptanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin adil akan mendapat naungan Allah seperti pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ،

وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًّا

فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ

³⁹ Azhari Andi, “Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Qs. Al-Baqarah (2): 30-34,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 4, no. 1 (2019): hlm. 45-60, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.883>.

Referensi : <https://almanhaj.or.id/13029-tujuh-golongan-yang-dinaungi-allah-azza-wa-jalla-pada-hari-kiamat.html>Dari Abu Hurairah r.a berkata : Nabi Saw bersabda: Tujuh golongan orang yang dapat bernaung di bawah naungan Allah, dihari tidak ada naungan kecuali naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang rajin ibadah terhadap Allah, orang berdzikir ingat kepada Allah sendirian sampai mencururkan air matanya, orang yang hatinya senantiasa terpaut pada tempat ibadah (masjid), dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik dikala berkumpul atau berpisah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan bangsawan nan menawan, sehingga menolak dengan berkata: aku takut pada Allah, dan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya serta seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis." (HR. Bukhari)⁴⁰

Tujuh golongan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di atas, yang pertama adalah Imam yang adil. Menurut Ibnu Rajab, pemimpin yang adil akan menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan pada hari kiamat. Demikian juga pemimpin yang berlaku adil akan berada di atas mimbar cahaya di sebelah Allah. Derajat yang tinggi ini adalah hasil perjuangan melawan nafsu, kesabaran yang ia tunjukkan dalam meredam apa yang diinginkannya, meredam keserakahan dan amarahnya, meskipun ia sebagai seorang pemimpin mampu mencapai tujuannya dengan mudah. Ibnu Rajab menilai pemimpin yang adil adalah yang paling bermanfaat bagi hamba-hamba Allah karena dengan kekuasaannya, seluruh kolega dan bawahannya akan bertakwa jika pemimpin mereka bertakwa. Pemimpin yang adil diilustrasikan sebagai wakil Tuhan di bumi karena seluruh rakyat mencari perlindungan di bawah kekuasaannya, maka idealnya pemimpin harus bersikap adil dan melayani rakyatnya dengan baik.⁴¹

Pada hadis lain dikatakan bahwa pemimpin yang tidak berlaku adil akan menjadi penghuni neraka, seperti pada hadis yang diriwayatkan Imam at-Tabrani berikut ini:

عن ابن عباس-رضي الله عنهما-عن الِ نبِ يِ صِ إلى الله عليه وسِ لم: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة سِ تين سنة، وحِ دِ يقام في الأرض بحِ قه أركى فيها من مطر أربعين صباحا». رواه الِ طبرانِ يِ.⁴²

Dari Ibnu Abbas *ra.* dari Nabi Saw.: “Satu hari dipimpin seorang imam yang adil lebih baik dari enam puluh tahun ibadah, dan hukuman ditetapkan di bumi dengan sebenarnya lebih murni dari hujan empat puluh pagi.” (HR. at-Tabrani)

⁴⁰ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 234.

⁴¹ Zainuddin Abdurahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan, *Fath al-Bari*, Juz 6 (Kairo: Dar al-Haramain, 1996), hlm. 46.

⁴² al-Thabrani, “al-Mu’jam al-Awsat,” hlm. 92

Muhammad Ali Thaha memaknai kata imam dalam hadis tersebut bersifat umum berarti kata itu mencakup semua orang yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat dan umat muslim, pemimpin juga berarti orang yang memiliki jabatan dari kepala negara sampai kepala desa.⁴³ Dari Riwayat hadis Rasulullah Saw tersebut menjelaskan bahwa dipimpin oleh pemimpin yang adil lebih baik dari beribadah selama puluhan tahun, karena dampak dari pemimpin yang adil lebih luas dari beribadah sendirian, dan dengan ditegakkannya hukum dengan sebenar-benarnya lebih baik dari mendapatkan anugerah hujan. Di samping itu Allah akan senantiasa meridhai dan merahmati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dalam hadis itu seorang Imam (pemimpin) akan Allah Selamatkan dari hari tanpa naungan kecuali naungan Allah Swt.

d. Menunaikan Amanah.

Muhammad Ali Thaha mengatakan bahwa amanah mencakup seluruh aspek kehidupan, siapa pun yang membocorkan rahasia kepada individu maka itu adalah amanah, harta, anak adalah amanah dan demikian juga kepemimpinan adalah amanah. Argumennya ini dikuatkan dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Hasan dari Rasulullah Saw berkata: “Seluruh anggota tubuh manusia adalah amanah, semua kewajiban Ilahi adalah amanah, dan segala interaksi dan transaksi amanah.” adalah manusia.

وجوارح النّسان كإلها أمانة، وإل تكاليف اللّهِ إلة كإلها أمانة، ”ومعاملت إناس كإلها أمانة⁴⁴

Meskipun al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan siapa dan bagaimana kriteria pemimpin yang berhak menerima jabatan tersebut, hadis Nabi menguraikan dengan spesifik kriteria pemimpin yang dapat ditemukan dalam literatur-literatur hadis. Satu di antaranya adalah hadis tentang karakter amanah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apabila amanah disia- siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, sahabat bertanya: “Bagaimana (bentuk) penya-nyian itu?” Nabi menjawab: “jika (penanganan) suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhari)⁴⁵

Ibnu Bathal menilai sabda Nabi Muhammad Saw mengindikasikan akan terjadi kegagalan tata kelola jika urusan itu dipercayakan kepada orang-orang yang tidak memiliki integritas dan sifat amanah. Menurutnya, Allah telah menitipkan rakyat kepada para pemimpin, dan menjadi kewajiban pemimpin untuk mengarahkan, mengayomi dan menunaikan janji kepada rakyat sebagai implementasi amanah dalam kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi “*Kalian semua adalah seorang penggembala dan masing-masing dari kalian*

⁴³ Muhammad Ali Thaha ad-Darah, *Tafsir al-Qur'an al-Karim wa I'rabuhu wa Bayanuhu*, Juz 2 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2009), hlm. 499.

⁴⁴ ad-Darah, hlm. 498.

⁴⁵ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 2382

bertanggung jawab atas kawanan dombanya” – maka mereka harus menunjuk orang-orang yang beragama dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah kepemimpinan.⁴⁸ Ibnu Bathal mengatakan jika pemimpin meneladani orang-orang selain umat beragama, dan mempergunakan orang-orang yang menolongnya dalam kezaliman, maka pemimpin telah kehilangan amanah yang Allah titipkan kepada mereka

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang Amanah merupakan sosok yang menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kepemimpinannya. Sikapnya yang terhormat dan berintegritas tinggi menandakan bahwa ia tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan rakyatnya. Pemimpin yang Amanah senantiasa berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan Masyarakat sebagai prioritas utama.

e. Jujur.

Kejujuran merupakan nilai etika yang sangat penting dalam kepemimpinan karena mencerminkan integritas dan kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Seorang pemimpin yang jujur akan selalu berbicara dan bertindak berdasarkan kebenaran, tanpa menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi atau kelompok. Sikap jujur ini memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Selain itu, pemimpin yang jujur mampu membangun ikatan kepercayaan yang kuat dengan rakyatnya, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam Masyarakat.

Kejujuran dianggap sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah Swt, karena Allah mencintai hamba-Nya yang jujur dan dapat dipercaya. Sifat jujur idealnya harus hadir pada setiap individu lebih lagi harus hadir pada seorang pemimpin seperti tercermin dari hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ

الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan

sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta." (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁶

Ibnu Bathal mengutip perkataan Lukman Hakim, ketika ditanya tentang apa yang dilihat dari seseorang, ia mengatakan perkataan yang jujur, menunaikan amanah dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.⁴⁷ Karakter jujur adalah *core value* seorang muslim seperti hadis yang diriwayatkan Malik dari Shafwan bin Salim ketika bertanya kepada Nabi Saw. "apakah seorang muslim itu pembohong? Beliau menjawab tidak" hadis ini menunjukkan bahwa bukanlah mukmin yang sempurna jika masih berbohong.⁴⁸

Ibnu Ruslan menafsirkan kata "فإن الصدق يهدي إلى البر" bahwa kejujuran mengantarkan seseorang –terlebih pemimpin- kepada kekuatan spiritual, menjadikannya orang yang baik, ikhlas, ta'at dan menjadi teladan. Ibnu Ruslan memaknai kata الفجور dengan kecenderungan untuk bersikap inkonsisten dalam beragama, seperti yang ia katakan bahwa ketidakjujuran (الكذب يهدي إلى الفجور) (إن) mengantarkan kepada perbuatan yang tercela dan kemaksiatan.⁴⁹

Korelatif dengan hadis sebelumnya, Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang balasan bagi pemimpin yang menipu dan bersikap tidak jujur terhadap rakyatnya, seperti pada hadis yang diriwayatkan dari Ubaidullah dari Ma'qil bin Yasar berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ayshab dari Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar Al-Muzanni ketika dia sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, maka Ma'qil lalu berkata, "Sungguh saya akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya saya masih hidup lama niscaya tidak akan saya ceritakan hal ini kepadamu. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pemimpin yang Allah serahi untuk memimpin rakyatnya, ketika meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Yunus dari Hasan dia berkata, "Ibnu Ziyad menemui Ma'qil bin Yasar yang sedang sakit, seperti hadisnya Abu Al-Asyhab, lalu ia menambahkan, "Ibnu Ziyad bertanya, "Tidakkah sebelumnya kamu telah menceritakan hal ini kepadaku?" Dia menjawab, "Saya belum pernah menceritakan hal ini kepadamu atau belum pernah bercerita kepadamu." (HR. Muslim)

⁴⁶ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 2261

⁴⁷ Mulk, *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibni Bathal*, hlm. 280

⁴⁸ Mulk, hlm. 280

⁴⁹ Syihabuddin Abu al-Abas Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Ruslan, *Syahr Sunan Abi Dawud*, Juz 19 (Mesir: Dar al-Falah, 2016), hlm. 129.

Arti kata *ghasa* dalam bahasa Arab adalah menipu atau menghilangkan kepercayaan (غسوا الأمانة), menipu adalah sikap tidak jujur kepada rakyat. Aws ibn Hajar mengatakan dalam Syairnya.⁵⁰ Menurut Imam an-Nawawi kata Allah Swt. mengharamkan surga bagi pemimpin yang menipu rakyatnya mengandung dua makna, pertama; makna haram dalam hadis ini adalah pengharaman menjadi hak prerogatif Allah, dalam arti adalah sepenuhnya hak Allah untuk memasukkan pemimpin yang menipu rakyatnya itu atau tidak memasukkannya ke dalam surga selamanya. Kedua; bermakna bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga bersamaan dengan para pemimpin yang jujur lainnya.⁵¹ Maka jika pemimpin mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya, maka itu berarti ia menipu masyarakat dengan menyia-nyiakannya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Interpretasi ulama hadis dari ucapan Maqil kepada Ubaidillah bin Ziyad pada hadis di atas memberikan pemahaman bahwa Rasulullah Saw menegaskan kejujuran merupakan sifat yang sangat dicintai Allah.

f. Tanggung jawab.

Bertanggung jawab adalah satu di antara banyak sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Seperti pada hadis di bawah ini:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ

مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)⁵²

⁵⁰ Abu al-Hasan ibn Ismail al-Mursi, *al-Muhkam wa al-Mahit al-A'zam*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000), hlm. 349.

^{51 57} an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, hlm. 166.

⁵² an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 1459

Al-Khitabi mengartikan penggembala (*ra'i*) pada hadis di atas semakna dengan kata wali (pemimpin) yang bertugas mengayomi dan melayani rakyatnya.⁵³ Pemimpin (wali, imam, amir) memerintah rakyat dan menasihati mereka dalam apa yang mereka lakukan. Pendapat al-Khitabi selaras dengan apa yang dikatakan al-Thibi dalam *kitab al-Kasyif an Haqaiq as-Sunan*, ia mengatakan redaksi hadis ini memperingatkan pemimpin untuk tidak mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepada mereka atau mengabaikan kepercayaan, dan memberitahukan mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku dan perbuatannya.⁵⁴

Menurutnya, hadis ini mengindikasikan bahwa pemimpin harus memiliki sikap bertanggung jawab, karena setiap individu adalah pemimpin, kepala keluarga adalah pemimpin, seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, hamba sahaya adalah pemimpin yang menjaga harta tuannya, dan minimal setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Penjelasan hadis di atas mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta setiap individu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan menyadari sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat, umat muslim diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh berkah, dan selaras dengan ajaran agama Islam. Pemimpin yang berlandaskan kesadaran akan akibat dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Swt akan membawa manfaat bagi masyarakat dan membantu mencapai kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan penuh berkah

f. Usia dan Pengalaman

Isu usia, kematangan dan pengalaman sedang hangat diperbincangkan menjelang Pemilu/pilkada 2024. Hal ini dipicu oleh aspirasi kaum muda yang juga ingin ikut berkontribusi terhadap kemajuan negara. Peneliti menemukan beberapa hadis yang relevan dengan diskursus usia dan pengalaman. Hadis yang berkaitan dengan usia dengan makna matan yang sama dideteksi ada pada kitab Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Abu Ya'la al-Mausili dan al-Baihaqi, berikut beberapa hadis yang dimaksud:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah berkata; saya mendengar Abu Al-Bakhtari Ath-Tha'i berkata; telah mengabarkan kepadaku seseorang yang mendengar Ali Radhiallah 'anhu berkata; Tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengutusku ke Yaman, saya berkata; "Anda mengutusku, padahal aku masih berusia sangat muda, dan saya tidak memiliki banyak pengalaman ilmu untuk memutuskan sesuatu perkara." Ali Radhiallah 'anhu berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menepuk dadaku dan bersabda: "Pergilah,

⁵³ Abu Sulaiman Hamdan ibn Muhammad al-Khitabi, *Ma'alimi as- Sunan (Syarh Sunan Abi Dawud)*, Juz 3 (Syiria: Halabal-Batba'ah al-Ilmiyah, 1932), hlm. 2.

⁵⁴ Syarifuddin al-Husain ibn Abdullah at-Thibi, *Syarh at-Thibi ala Misykat al-Masabih al-Musama al-Kasif an Haqaiq al-Sunan*, Juz 8 (Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997), hlm. 2568

sesungguhnya *Allah Azza Wa Jalla* akan meneguhkan lidahmu dan menunjuki hatimu! " dia menambahkan; Maka tidak ada persengketaan di antara dua orang yang dapat menyulitkanku

Hadis di atas menggunakan redaksi (وَأَنَا رَجُلٌ جَدِيثٌ أَلِ سِنٍ)

“padahal aku masih berusia sangat muda”, sementara pada hadis lain menggunakan redaksi (أَسْنُ مَنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ). menurut Ibnu Hajar al-Asqalani hadis ini yang dikutip dari periwayatan Jabir berkaitan dengan Ali Ra. yang diutus Rasulullah ke Yaman sebelum haji wada'.⁵⁵ *Sayyidina* Ali lahir pada tahun 23 SH/599 M wafat pada 40 H/661 M. Rasul mengutus Ali ke Yaman pada tahun 10 H, ketika diutus usia *Sayyidina* Ali adalah 32 Tahun.⁵⁶ Usia Ali Ra. kala itu termasuk masih muda untuk seorang delegasi yang diberi amanah besar untuk menyebarkan agama Islam dan mengajak masyarakat Yaman untuk beriman kepada Allah dan RasulNya.

Namun di usianya yang masih muda tersebut Rasulullah meyakinkan Ali bahwa ia mampu untuk mengemban amanah yang besar itu, hal itu ditunjukkan dengan perkataan Nabi “pergilah” dan dengan pertolongan dari Allah yang akan menuntun hati dan lisan Ali. Menurut Ibnu Ruslan dalam syarh Sunan Abi Dawud bahwa ini mengindikasikan walau usia muda unsur pengetahuan dan spiritual harus hadir untuk meneguhkan diri sebagai pemimpin delegasi.⁵⁷ Hal ini korelatif dengan zaman sekarang para pemuda milenial dan gen z selama memiliki pengetahuan, spiritualitas serta pengalaman maka tidak ada salahnya untuk menjadi pemimpin.

Hadis yang berkaitan dengan pengalaman diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dan lainnya sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Dari Abu Sa'id ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiada yang memiliki ketabahan kecuali seorang yang telah mengalami ujian. Tidak ada kebijaksanaan, kecuali yang telah kenyang pengalaman." Abu Isa berkata; Ini adalah hadis hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.

Memaknai hadis ini at-Thibi mengatakan, kalimat (ذو عثرة لَّ حَلِيمٍ إِلَّا) mengandung arti tidak akan sampai pada sifat dewasa dan ketabahan kecuali setelah melalui keadaan yang sulit, berat, melelahkan yang menjadikannya terjatuh, kemudian ia mempertimbangkan dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan untuk dihindari dan dijadikan pembelajaran dan pengalaman.⁵⁸

⁵⁵ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarh al- Bukhari*, Juz 8 (Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, 1970), hlm. 65.

⁵⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Ali Bin Abi Thalib* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 14.

⁵⁷ Ruslan, *Syahr Sunan Abi Dawud*, hlm. 624

⁵⁸ at-Thibi, *Syarh at-Thibi ala Misykat al-Masabih al-Musama al-Kasif an Haqaiq al-Sunan*, hlm. 3223.

Sementara kalimat (وَلَّ حَكِيمًا ذُو تَجْرِبَةٍ) bermakna bahwa tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang melakukan kesalahan. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang maha pemaaf kecuali orang yang pernah melakukan kesalahan, yang dalam hal ini dia bisa jadi merasa malu atas kesalahannya itu, maka siapa yang melihatnya hendaknya menutup-nutupi kesalahannya dan memaafkannya. Dengan demikian, ia akan mengetahui bahwa memaafkan orang dan menutupi kesalahannya adalah hal yang diinginkan manusia dan diridhai Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian pemahaman terhadap kesalahan dan kekeliruan menjadikan seseorang menjadi lebih bijaksana dan berpengalaman.

Dari dua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa usia tidak selamanya berpengaruh pada sikap memilih pemimpin, bisa jadi walau usianya muda tetapi ia memiliki ilmu, spiritualitas agama, integritas dan spirit untuk menjadi pelayan masyarakat. Sementara hadis kedua mengindikasikan bahwa kepahitan dan pengalaman yang kurang berkesan dapat membentuk manusia dan calon pemimpin untuk menjadi orang yang dewasa, bijaksana dan berpengalaman.

SIMPULNAN

Secara keseluruhan, dalam perspektif Islam, Pilkada adalah sarana penting untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Melalui Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam Pilkada tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban moral bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik dalam melayani masyarakat dan menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan kriteria pemimpin. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam hadis Nabi ada tujuh karakter sifat-sifat profetik yang harus dimiliki pemimpin yaitu: beragama dan memahami nilai-nilai agama, memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial, berlaku adil dalam kepemimpinan, mampu menjalankan dan menunaikan amanah yang diberikan, berintegritas dan jujur, memiliki sikap bertanggung jawab dan memahami bahwa semua ada pertanggungjawabannya kepada Allah dan masyarakat yang dipimpinnya serta memiliki pengalaman, kematangan spiritual, kedewasaan dan kebijaksanaan, walau masih dalam usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Abu Hasan. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Andi, Azhari. "Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Qs. Al-Baqarah (2): 30-34." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.883>.

Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, dan Asep Aji Pramayoga. "Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)." *Jurnal PIKOM*

(*Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*), Vol. 20, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Ali Bin Abi Thalib*.

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-. *Fathu al-Bari bi Syarh al- Bukhari*.
Juz 8. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, 1970.

Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Alu ibn Musa al-Khusraujirdi al-
Kharsani Abu Bakr al-. *Kitab al-Zuhdi al-Kabir*. Beirut: Muasasah al-Kitab
Tsaqafiyah, 1996.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih al- Bukhari*.
Diterjemahkan oleh Musthafa Dib al-Bahga. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Chasnowati, Muthik. “Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam
Meningkatkan Mutu Lembaga.” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 1
(2014). <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.1.72-86>.

Dahlan, Muhammad. “Nabi Muhammad Saw. (Pemimpin Agama dan
Kepala Pemerintahan).” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 6, no. 2
(2018). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i2.6912>.

Darah, Muhammad Ali Thaha ad-. *Tafsir al-Qur'an al-Karim wa I'rabuhu
wa Bayanuhu*. Juz 2. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2009

Faridah, Ai, dan Titin Yuniartin. “Etika Kepemimpinan dalam Perspektif
Hadis Nabi.” *Irfani*, Vol. 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36667/irfani.v2i1.235>.

fiya, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'. *al- Jami' al-
Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunnatihi wa
Ayyamihi (Sahih al- Bukhari)*. Cet. III. Juz 6. Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t.

Habib, Mustafa. “Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrepresentasi
(Kajian Pemilu Indonesia).” *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 1, no. 1 (2020).
<https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/392>.

Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Diterjemahkan oleh Adil
Mursyid. Juz 10. Muasasah ar-Risalah, 2001.

Hasan, Zainuddin Abdurahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-. *Fath al-Bari*.
Juz 6. Kairo: Dar al-Haramain, 1996.

Hisyam, Ibnu. *as-Sirah an-Nabawiyah*. Cet. 1. Kairo: Dar Al- Hadis, 1996.

Ibad, Ibnu. *al-Muhith fi al-Lughoh*. Kairo, t.t.

Jarud, Abu Dawud at-Tayalisi Sulaiman ibn Dawud ibn al-. *Musnad Abi
Dawud at-Tayalisi*. Juz 1. Mesir: Dar Hijr, 1999.

Khaldun, Ibnu, dan Ismail Yakub. *Muqaddimah Ibnu Khaldun (Suatu
Pendahuluan)*, 1982.

Khidri, Muhammad. “Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis.” *Rihlah:
Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 5, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162>.

Khitabi, Abu Sulaiman Hamdan ibn Muhammad al-. *A'lam al- Hadis (Syarh
Shahih al-Bukhari)*. Juz 2. Saudi Arabia: Jami'ah Um al-Qura, 1988.

———. *Ma'alimi as-Sunan (Syarh Sunan Abi Dawud)*. Juz 3.

Syiria: Halabal-Batba'ah al-Ilmiyah, 1932.

Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>.

Maklup, Luis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Adab wa Al-A'lam*. Matba'ah al-Istiqamah, 1973.

Malak, Muhammad ibn Izzuddin Abdul Latif ibn Abdul Aziz ibn. *Syarh Masabih as-Sunnah li al-Imam al-Baghawi*. Juz 3. Idarah at-Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.

Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Mulk, Ibnu Bathal Abu al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abdul. *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal*. Riyadh: Maktabah ar-Rushdi, 2003.

Mursi, Abu al-Hasan ibn Ismail al-. *al-Muhkam wa al-Mahit al-A'zam*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000.

Musa, Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn. *al-Bahru al-Muhit ast- Stujaj fi Syarh Shahih al-Imam Muslim ibn al-Hajaj*. Juz

16. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2015.

Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj an-. *Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Ahmad ibn Rafi'at. Juz 6. Turki: Dar at-Taba'ah al-Amirah, 1433.

Nasution, Ade Parlaungan. "Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Artikel dan Opini Ade Parlaungan Nasution*, Vol. 1, no. 1 (2018).

Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf an-. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Juz 16. Beirut: Dar Ihya at-Turast al-Arabi, 1431.

Nizar, Samsul dan Dkk. *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Patih, Ahmad. "Decision Making (Landasan Teologis, Filosofis, Psikologis dan Sosiologis Kepemimpinan Pendidikan di MA Al-Karimiyah)." *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i2.11>.

Quzwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 4. Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Rofiq, Nur, dan Sigit Tri Utomo. "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.56>.

Ruslan, Syihabuddin Abu al-Abas Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn. *Syahr Sunan Abi Dawud*. Juz 19. Mesir: Dar al-Falah, 2016.

Said, Syamsuddin al-Karmani Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn. *al-Kawakib ad-Darari fi Syahr Shahih al-Bukhari*. Juz 24. Beirut: Dar Ihya at-Turast al-Arabi, 1981.

Shobron, Sudarno. "Konsep Etika Berpolitik dalam Kitab Sunan Abu Daud." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.31291/jlk.v11i1.55>.

Sibt, Abu Fadl 'Iyadh ibn Musa ibn 'Iyadh ibn Amrun al- Yahsibi as-. *Ikmal al-Mualim bi Fawaid Muslim*. Diterjemahkan oleh Yahya Ismail. Juz 8. Kairo: Dar al-Qafa', 1998.

Sidiq, Umar. “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits.” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 12, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.305>.

Syarwi, Pangi. “Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019.” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4, no. 1 (2022). <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>.

Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-. “al-Mu’jam al- Awsat.” Juz 7. Kairo: Dar al-Haramain, 1995.

Thibi, Syarifuddin al-Husain ibn Abdullah at-. *Syarh at-Thibi ala Misykat al-Masabih al-Musama al-Kasif an Haqaiq al- Sunan*. Juz 8. Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa at-. *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Zuhaili, Wahbah al-. *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as- Syari’ah wa al-Manhaj*. Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.